

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan I, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ady Purwoto, Et. Al., 2023, *Hukum Tata Negara (Konsep dan Teori)*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Agus Riewanto, Et. Al., 2023, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- Agus Wibowo, 2025, *Sejarah Teori Hukum*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang.
- Alexander Hamilton, James Madison, dan John Jay, 2009, *The Federalist (The Gideon Edition)*. Ed., Sálvio Marcelo Soares, MetaLibri, Amsterdam.
- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2002, Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Penjelasannya, Badan Legislasi, Jakarta.
- _____, 2002, *Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Legislasi, Jakarta.
- _____, 2004, *Laporan Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Pembahasan RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 15 Juli 2004*, Badan Legislasi, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., 2005, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Fit and Proper Test dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Badan Pengkajian MPR RI, 2017, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Badan Pengkajian, Jakarta.

Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.

_____, 2016, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, penterjemah: Nirwono dan AE Priyono, LP3ES, Jakarta.

Eka N.A.M. Sihombing dan Ali Marwan (ed.), 2020, *Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H.*, Enam Media, Medan.

Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta Selatan.

Hedwig Adianto Mau dan Tinton Ditisrama, 2024, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Penerapan*, Penerbit Amerta Media, Purwokerto.

Ibnu Sam Widodo, Et. Al., 2023, *Hukum Tata Negara*, Sada Kurnia Pustaka, Banten.

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.

I Gede Yusa (ed.), 2011, *Demokrasi, HAM, dan Konstitusi: Perspektif Negara-Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan*, Setara Press, Malang.

I Made, Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Imran Festy dan Rahma Hidayati (ed.), 2019, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Indra Muchlis Adnan, 2019, *Negara Hukum dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

_____, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Kejaksaan Agung RI, 1985, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia (1945-1985)*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Maeve P. Carey dan Betsy Palmer, 2012, *Presidential Appointments, the Senate's Confirmation Process, and Proposals for Change, 112th Congress*, Congressional Research Service, Washington, D.C

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia–Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Miriam Budiardjo, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jakarta.

Radian Salman, *Et. Al.*, 2020, *Kajian Terhadap UUD NRI 1945 dan Pelaksanaannya*, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta.

R.M. Surachman dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rhona K.M. Smith, *Et. Al.*, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Edisi Revisi)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Soeprijadi (ed.), 1992, *Kapita Selekta Undang-undang No. 5 Th 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sufmi Dasco Ahmad, 2022, *Perkembangan Pemikiran Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, PT Rajawali Buana Pusaka, Jakarta.

Syafliansah, *Et. Al.*, 2025, *Metode Penelitian Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (LN No. 254 Tahun 1961, TLN No. 2298).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN No. 59 Tahun 1991, TLN No. 3451).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN No. 298 Tahun 2021, TLN No. 6755).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (LN No. 35 Tahun 2025, TLN No. 7104).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN No. 182 Tahun 2017, TLN No. 6109).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN No. 188 Tahun 2025, TLN No. 7149).

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30/PUU-XXI/2023.

D. Jurnal

Abdul Rahman, 2024, "Menjajaki Konsep Hukum Negara Indonesia", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 10, No. 2.

Agustinus Michael Saragih, Syamsir, dan Bustanuddin, 2026, "Analisis Pengaturan Pengisian Jabatan Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 6, No. 2.

- Ali Bhatti, 2026, "The Legal Doctrine of Separation of Power in the Constitution", *Irshad International Journal of Law and Policy*, Vol. 4, No. 1.
- Alvindi Mochammad Raka Feyandi, Fahmi Rizqi Fauzi, Noufal Muhamad Nugraha, 2024, "Politik Indonesia Masa Kepemimpinan Soekarno", *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 5.
- Andrey Borges de Mendonça, 2024, "The Prosecutor in the Brazilian Legal System", *DPCE Online*, Vol. 62, No. 1.
- Belly Isnaeni, 2021, "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD NRI 1945 Pasca Amandemen", *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. 6, No. 2.
- Bilqis Dewi Purnomo, 2024, "Peran Lembaga Negara dalam Memperkuat Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Lontar Merah*, Vol. 7, No. 2.
- Desi Yumenty, 2023, "Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 1, No. 1.
- Devy M. Puspitasari, Sotarduga Napitupulu dan Djoko Roespinoedji, 2021, "Fit and Proper Test: A Determinant Of Good Corporate Governance Banking Industry in Indonesia", *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, Vol. 17, No. 10.
- Didit Ferianto Piloc, 2013, "Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4.
- Dorota Mokrosinska, 2023, "Necessary but Illegitimate: On Democracy's Secrets", *The Review of Politics*, Vol. 85, No. 1.
- Eki Furqon, 2020, "Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Fachrizal Afandi, 2025, "Regulating Prosecutorial Independence and Impartiality in The Indonesian Criminal Justice System", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 25, No. 2.

Ferry Ardiansyah dan Romli SA, 2023, "Independensi Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia", *Jurnal Elqonun*, Vol. 1, No. 1.

Firdaus Arifin, 2024, "Pembentukan Kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia: Studi Komparasi UUD NRI 1945 Sebelum dan Setelah Perubahan", *Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 2.

Hisyam Hisyam, Rahmatul Hidayati, dan Budi Parmono, 2026, "Executive-Legislative Relations in Appointing the Indonesian National Police Chief", *Jurnal Academia Open*, Vol. 11, No. 1.

Husin Husaini dan Muhammad Afdhal Askar, 2020, "Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2.

Khunaifi Alhumami, 2010, "Putusan Mahkamah Konstitusi dan Independensi Jaksa Agung", *Jurnal Bina Adhyaksa*, Vol. 1, No. 1, Desember 2010.

Mei Susanto, 2016, "Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4.

Mohd. Yusuf Daeng M, *Et. Al.*, 2023, "Peranan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4.

Muhammad Ali Murtadha, Eza Aulia, dan Jefrie Maulana, 2025, "Tinjauan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 dalam Mewujudkan Independensi Lembaga Kejaksaan", *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan)*, Vol. 9, No. 1.

Muhammad Azzrul Radhiansyah dan Luthfillah Arrizqi Zainsyah, 2025, "Kewenangan Dominus Litis Jaksa dalam Peradilan Pidana Indonesia:

Problematika Bolak-Balik Berkas dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 9, No. 2.

Ngurah Wahyu Resta, 2025, "Legal Certainty of The Independence of The Prosecutor's Office In Indonesia", *Journal of Social Research*, Vol. 4, No. 4.

Nia Gabriella Kaihena, 2023, "Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2.

Ni'matul Huda, 2001, "Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia", *Jurnal Hukum*, No. 18, Vol. 8.

Pasrah Kasih Sejati Hulu dan Ojak Nainggolan, 2025, "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Terkait Dengan Independensi Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangan", *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 8, No. 1.

Rian Adhivira Prabowo, 2020, "Beberapa Catatan dari Limitasi atas Limitasi Pengaturan HAM dalam Konstitusi", *Indonesian State Law Review*, Vol. 2, No. 2.

Russell L. Weaver, 2015, "Advice and Consent in Historical Perspective", *Duke Law Journal*, Vol. 64, No. 8.

Sipghotulloh, 2021, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3.

Tara Leigh Grove, 2012, "A (Modest) Separation of Powers Success Story", *Notre Dame Law Review*, Vol. 87, No. 4.

Titik Triwulan Tutik, 2011, "Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem Penetapan Jabatan Pejabat Negara", *Jurnal Hukum*, No. 4, Vol. 18.

Topo Santoso, 2001, "Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kejaksaan dan Draft RUU Kejaksaan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 31, No. 02.

Yudha Yosephin Tambunan, Kezia Ananda Restu, dan Cindy Valentina Natasya S, 2023, "Telaah Konstitusi Check And Balances DPR Atas Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengisian jabatan Pejabat Negara", *Jurnal Riset dan Pengabdian*, Vol. 1, No. 2.

E. Makalah

Andi Hamzah, 2003, "Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 13 Juli 2003.

F. Tesis

Fandi Ilham, 2024, "Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang.

Widha Sinulingga, 2016, "Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Analisis Kewenangan Penuntutan dalam Perspektif Negara Hukum dan Pembagian Kekuasaan)." Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

G. Internet

Antonius, "Tugas dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia", <https://media.neliti.com/media/publications/210282-tugas-dan-kedudukan-lembaga-kejaksaan-se.pdf>.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dalam Proses Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia", <https://www.dpr.go.id/dokumen/arsip/arsip-legislasi/detail/153>.

Hukumonline, "DPR Ciptakan Sendiri 'Fit and Proper'", <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-ciptakan-sendiri-fit-and-proper-lt504dd6fbc2633/>.

_____, "Jaksa Agung ST Burhanuddin Diragukan Independensinya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-agung-st-burhanuddin-diragukan-independensinya-lt5db0056febf25/>.

_____, "Undang-Undang Kejaksaan yang Baru: Gagalnya Campur Tangan DPR", <https://www.hukumonline.com/berita/a/undangundang-kejaksaan-yang-baru-3-gagalnya-campur-tangan-dpr-hol10757/?page=3>.

Tempo, "Baharuddin Lopa Tak Sampai Sebulan sebagai Jaksa Agung Bikin Ngeri Koruptor", <https://www.tempo.co/hukum/baharuddin-lopa-tak-sampai-sebulan-sebagai-jaksa-agung-bikin-ngeri-koruptor--300347>.

_____, "Kedekatan Jaksa Agung Burhanuddin dengan PDIP Disorot", <https://www.tempo.co/politik/kedekatan-jaksa-agung-burhanuddin-dengan-pdip-disorot-872948>.

LegalClarity, "28 USC 541: How U.S. Attorneys Are Appointed and Removed", <https://legalclarity.org/28-usc-541-u-s-attorney-appointments-and-terms-explained/>.

Ministério Público Federal, "*Me Explica, MPF: Como o Procurador-Geral da República é Escolhido para o Cargo?*", <https://www.mpf.mp.br/o-mpf/unidades/procuradoria-geral-da-republica-pgr/noticias/me-explica-mpf-como-o-procurador-geral-da-republica-e-escolhido-para-o-cargo>.

Yusril Ihza Mahendra, "Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial dibawah UUD NRI 1945", <https://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pondahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/>.

